

## **Kebijakan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19**

**Nur Afni**

Fakultas Ekonomi Universitas Alkhairaat Palu

Email:

[nur.afni.tadjuddin87@gmail.com](mailto:nur.afni.tadjuddin87@gmail.com)

### **Abstrak**

COVID-19 ialah pandemi global yang pastinya memunculkan timbulnya bermacam golongan, paling utama di golongan publik. Semenjak diresmikan World Health Organization selaku pandemi global, manajemen penindakan COVID-19 jadi tantangan untuk negara- negara dengan sumber energi serta sistem pelayanan kesehatan yang terbatas. Pemahaman warga terus berkembang bersamaan dengan jumlah permasalahan positif serta kematian akibat COVID-19 yang terus bertambah dalam waktu yang relatif pendek. Kemahiran tiap- tiap negara buat menyesuaikan diri dengan kondisi yang terdapat sepanjang implementasi yang efisien serta antisipatif sangat bermacam- macam. Kebijakan ialah landasan dini yang wajib dicoba supaya bisa menanggulangi kasus tersebut dengan sukses. Keputusan kebijakan antisipatif terpaut upaya penangkalan penyebaran COVID-19, penindakan penderita terinfeksi, proteksi tenaga kesehatan, serta pengendalian kepedulian publik mesti dipertimbangkan secara matang. Untuk itu, Pemerintah berupaya menjadwalkan kebijakan New Normal supaya imbas ekonomi dari pandemi tidak memunculkan krisis berkelanjutan. Kebijakan ini terpaut dengan perencanaan pembangunan dimana Pemerintah sudah menetapkan program, sasaran, serta proyek besar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024. Pemerintah butuh mengkaji ulang rencana jangka menengah mengingat pada tahun 2020 seluruh program yang dicoba hendak fokus pada penindakan Covid-19. Pemerintah mempunyai 3 alternatif dalam jangka menengah, apakah senantiasa dengan semula, melaksanakan perbaikan moderat, ataupun mengubahnya dengan rencana baru dengan anggapan yang sudah terbuat dengan terdapatnya pandemi Covid-19 serta akibat yang menyertainya.

**Kata Kunci: Covid-19; Kebijakan Ekonomi; Masyarakat.**

### **Abstract**

COVID-19 discovered a global pandemic that gave rise to the emergence of various groups, especially the public. Inaugurated by the World Health Organization as a global pandemic, the management of COVID-19 is a challenge for countries with limited energy sources and health care systems. Citizens' understanding continues to grow along with the number of positive problems and deaths due to COVID-19 which continues to grow in a relatively short time. The ability of each country to adapt to the existing conditions during efficient and anticipatory implementation varies greatly. The policy finds an early ground that must be tested in order to be able to tackle these cases successfully. Anticipatory policy decisions related to efforts to prevent the spread of COVID-19, take action against infected patients, protect health workers, and control public awareness are carefully considered. For this reason, the Government is trying to schedule a New Normal policy so that the economic impact of the pandemic does not create a sustainable crisis. This policy is linked to planning where the Government has established programs, as well as major projects in the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN). The government needs to review the medium-term plan considering that in 2020 all programs that are trying to focus on taking action against Covid-19. The government has 3 alternatives in the medium term, whether it is always quality, making moderate improvements, or changing it with a new plan with assumptions made from the Covid-19 pandemic and the consequences that accompany it.

**Keywords: Covid-19; Economic Policy; Public.**

## **PENDAHULUAN**

Perekonomian suatu negara tidak bebas dari keikutsertaan pemerintah karena pemerintahlah yang menata segalanya, mengenai semua kebijaksanaan yang mengarah pada keberlangsungan kebijaksanaan negara itu sendiri. Masing-masing rezim yang mengetahui suatu negara mempunyai kebijaksanaan ekonomi yang dapat diharapkan untuk menjamin perekonomian yang positif dan normal untuk tercapainya kejayaan dan ketenteraman, sebab ialah peranan penguasa untuk menjaga perekonomian untuk tercapainya kehidupan yang aman dan sentosa buat rakyatnya..

Kebijaksanaan ekonomi suatu negeri tidak bisa diperoleh dari pengertian maupun sistem ekonomi yang dianut oleh penguasa suatu negara, seperti sistem ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, dan sistem ekonomi Islam. Nyatanya penguasa sebagai pengatur perekonomian suatu negara menganut sistem ekonomi sebagai dasar pengambilan kebijaksanaan ekonomi. Apapun sistem ekonomi yang diselenggarakan oleh penguasa, sistem ekonomi yang dipercayai sebagai sistem ekonomi terbaik buat perekonomian negara yang dipimpin oleh suatu

pemerintah/penguasa, meski nantinya dalam sistem ekonomi yang diselenggarakan, memiliki berbagai kelemahan.

Pemerintah selaku salah satu pelaksana ekonomi (rumah tangga), mempunyai peranan berarti dalam perekonomian yakni selaku, penentuan, serta penyaluran. Penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut yaitu, stabilitas merupakan penguasa dalam menghasilkan kemantapan ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan serta keamanan. Alokasi, yaitu tugas penguasa selaku fasilitator materi serta pelayanan masyarakat seperti pembangunan jalan, bangunan sekolah, penyediaan penerangan serta sarana telepon. Distribusi yaitu tugas penguasa dalam pemerataan ataupun pemerataan pemasukan penduduk.

Kedudukan dan tugas pemerintah dalam perekonomian di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi di banyak negara biasanya terjalin sebagai akibat dari intervensi pemerintah secara langsung ataupun tidak langsung. Intervensi pemerintah dibutuhkan dalam perekonomian guna kurangi kegagalan pasar (market failures) serupa kekakuan

harga dominasi serta akibat negatif dari aktivitas bisnis swasta semacam area.

2. Mekanisme pasar berjalan tanpa ketentuan yang terbuat oleh pemerintah. Peraturan ini membagikan dasar untuk penerapan ketentuan pokok, tercantum pengenaan sanksi untuk pelaksana ekonomi yang melanggarnya. Kedudukan pemerintah jadi lebih berarti sebab mekanisme pasar saja tidak bisa menuntaskan seluruh permasalahan ekonomi. Buat menjamin efisiensi, pemerataan serta perekonomian, kedudukan serta guna absolut dibutuhkan dalam perekonomian selaku pengendali mekanisme pasar.

Strategi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Indonesia yaitu koridor pembangunan ekonomi Indonesia dengan membangun pusat- pusat ekonomi di tiap pulau. Tidak hanya meningkatkan klaster industri berbasis sumber unggulan. Baik komoditas ataupun zona. Koridor pembangunan ekonomi Indonesia dipecah jadi 4 sesi:

- a) Mengenali pusat- pusat ekonomi, semacam ibu kota provinsi.

- b) Memastikan kebutuhan guna menghubungkan antara pusat- pusat ekonomi tersebut, semacam lalu lintas barang.

- c) Pengesahan guna menentukan sejalan dengan pembangunan nasional, adalah penyusunan perumahan dengan sistem serta fasilitas prasarana.

- d) Memastikan ikatan posisi zona fokus, guna mendukung sarana. Misalnya menghubungkan zona pertambangan dengan zona pengolahan.

Menguatkan ikatan nasional baik lokal ataupun internasional. Hal ini bisa kurangi pengeluaran transaksi, menghasilkan sinergi antar pusat perkembangan dan mengidentifikasi kebutuhan akan akses ke beberapa layanan. Seperti intra dan interkonektivitas antara pusat perkembangan dan pintu gerbang perdagangan serta pariwisata internasional. Integrasi ekonomi merupakan metode terbaik buat menggapai faedah langsung dari konsentrasi produksi. Serta dalam jangka panjang, tingkatkan taraf hidup.

Aktivitas ekonomi Indonesia di kota- kota spesialnya Jawa serta Sumatera.

Fasilitas transportasi yang bisa menimbulkan kawasan industri tidak menjangkau wilayah terpencil. Dalam jangka pendek, proyek yang butuh dibentuk di Jawa merupakan TransJawa, TransJabodetabek, KA jalan 2, Tanjung Priok. Pembangunan tersebut diharapkan berakibat langsung pada pengurangan kemiskinan di Jawa yang melebihi 20 juta orang, 2 kali lipat dari penduduk miskin Sumatera yang dekat 7 juta orang. Pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa bisa mendesak perkembangan ekonomi.

Disaat ini tengah berlangsung pandemi di seluruh dunia yang berakibat lumayan besar pada seluruh zona kehidupan manusia. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sudah menetapkan Coronavirus Disease 2019 ataupun COVID-19 selaku ancaman pandemi. Pengertian pandemi bagi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu wabah yang menyebar secara serentak di mana-mana ataupun mencakup geografi yang luas. Permasalahan ini mula-mula kali muncul di Wuhan, Cina serta mulai menyebar nyaris ke seluruh dunia. Penyebaran COVID-19 sangat cepat serta tidak ada yang dapat memprediksi kapan pandemi COVID-19 bakal berakhir.

Permasalahan Covid-19 yang jadi pandemi global, jelas menimbulkan timbulnya bermacam golongan, paling utama penduduk. Kekhawatiran penduduk terus menjadi bertambah dengan memandang kejadiannya yang cukup pesat, serta sedikitnya kesiapsiagaan sebagian elemen yang cukup bernilai untuk“ melawan” virus corona. Tingginya tingkat distribusi yang begitu mencukupi menuntut pemerintah guna selekasnya mengambil langkah-langkah strategis. Dengan menetapkan kebijakan antisipatif guna menanggulangi akibat COVID-19 (Ristyawati, 2019).

Indonesia ialah salah satu negara yang tidak luput dari peradangan virus Corona dari Wuhan, Cina yang timbul pada akhir tahun 2019 lalu serta diberi nama Covid-19. Permasalahan positif Covid-19 pertama kali ditemukan di Indonesia pada 2 Maret 2020 (Indonesia.go.id 2020) dengan teridentifikasinya 2 WNI sesudah melaksanakan kontak dekat dengan masyarakat negara asing. Kemunculan permasalahan Covid-19 awal di Indonesia diumumkan langsung oleh pejabat tertinggi pemerintah ialah Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (Goeritman, 2021).

**METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu metode yang akan memberikan gambaran tentang beberapa kemungkinan jawaban untuk memecahkan masalah yang sebenarnya (up to date) dengan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasikannya, menganalisis, dan menafsirkannya. Menurut Kutha sebagaimana dikutip Ansori (2019) bahwa metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian dijelaskan dengan analisis, tidak sekedar mendeskripsikan, tetapi juga memberikan pemahaman dan penjelasan yang cukup. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dimana peneliti mengumpulkan data dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis jurnal, buku, artikel dari peneliti sebelumnya yang sudah ada. objek penelitian serta sumber lain yang mendukung penelitian seperti foto, gambar, dan dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penulisan.

Studi Pustaka Bagi Sugiyono, (2016) berkaitan dengan kajian teoritis serta rujukan lain yang berkaitan dengan nilai,

budaya serta norma yang tumbuh dalam suasana sosial yang diteliti, tidak hanya itu riset literatur sangat berarti dalam melaksanakan riset, perihal ini sebab riset akan lepas dari sastra- sastra ilmiah. Data diperoleh dari data yang relevan dengan permasalahan yang hendak diteliti dengan metode melaksanakan riset kepustakaan lain semacam novel, harian, artikel, periset sebelumnya.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Polemik menimpa ada tidaknya Covid-19 di Indonesia akhirnya terjawab. Pemerintah mengumumkan 2 penderita awal di Indonesia yang dinyatakan positif Covid-19 pada 2 Maret 2020 serta meningkat jadi 19 orang (nasional.kompas.com, 9 Maret 2020). Menurut informasi CSSE Johns Hopkins, jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 di segala dunia sudah menggapai 118. 745 kasus, dengan kasus paling banyak di Cina, pusat penyebaran virus, dengan 80. 954 permasalahan. Di periode informasi saat ini, kabar membuat sebagian orang panik, tidak ada obat buat Covid-19. Salah satunya metode buat mencegah virus tersebut adalah dengan melindungi kebersihan diri serta kawasan dan menjauhi kontak langsung dengan orang yang terinfeksi Covid- 19 (Izzaty, 2020).

Indonesia merupakan salah satu negara yang bahkan telah menutupi 7,8 persen angka kematian dan merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Namun, pemerintah Indonesia enggan mengungkapkan informasi secara jelas kepada publik dengan dalih menangkal kepanikan. Di tengah jumlah kasus yang terus meningkat, Indonesia juga menerima 49 tenaga kerja asing asal China pada pertengahan Maret lalu (Kompas.com, 22 Maret 2020). Ada yang khawatir Presiden Joko Widodo lebih memperhatikan dampak Covid-19 terhadap perekonomian daripada memperbaiki sistem kesehatan negara.

Kekhawatiran itu terlihat ketika Presiden menolak memberlakukan lockdown atau penguncian sebagian Jakarta dan Jawa Barat, meski mendapat tekanan dari Gubernur Anies Baswedan. "Kami percaya Jakarta harus menghentikan aktivitas di ibu kota dan mencegah orang datang atau meninggalkan kota. Kami tidak bisa memutuskan ini sendiri, tetapi perlu bertindak cepat," kata Anies. ada penurunan aktivitas dengan banyak orang bekerja dari rumah, presiden kembali mengingatkan para pemimpin daerah bahwa kebijakan lockdown di

tingkat daerah atau nasional adalah urusan otoritas pusat (Mufida, dkk, 2020).

Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah mengimbau para pekerja di daerah untuk bekerja dari rumah. Hal penting yang perlu dibahas dalam pembahasan mitigasi COVID-19 adalah seberapa banyak pekerjaan yang sebenarnya bisa dilakukan di rumah? Jika kebijakan Work From Home (KDR) diterapkan secara ketat dan untuk semua pekerja, pemerintah harus menyiapkan anggaran kompensasi bagi pekerja yang pekerjaannya tidak dapat dilakukan dari rumah dan KDR yang menyebabkan pendapatannya berkurang atau tidak ada. Ada berbagai variasi jenis pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah berdasarkan bidang pekerjaan. Dengan data yang lebih detail, kami menemukan bahwa pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi dapat dilakukan dari rumah (yaitu sekitar 88,9 persen). Sebagian besar pekerjaan yang bersifat manajerial, profesional dan profesional dapat dilakukan dari rumah (Wicaksono dan Mangunsong, 2020).

Sebelum pandemi Covid-19, Pemerintah telah melaksanakan berbagai program perlindungan sosial yang meliputi pemenuhan hak dasar masyarakat seperti perlindungan

kelompok rentan, akses pendidikan dan pelayanan kesehatan. Program ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari peristiwa/gangguan yang dialami masyarakat sehingga dapat terlindungi dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Program perlindungan sosial yang sudah berjalan sebelum pandemi Covid-19, yaitu

1. Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah pemberian bantuan tunai bersyarat bagi keluarga sangat miskin.
2. Kartu Indonesia Pintar-Kartu Indonesia Pintar/Program PIP-KIP. Bantuan tunai PIP-KIP untuk anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga miskin/rentan/prioritas.
3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Kesejahteraan Beras (Rastra) bagi keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di wilayah pelaksanaan.
4. Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) diberikan kepada penyandang disabilitas berat dan miskin. Besaran bantuan untuk setiap PD adalah Rp 300.000

per bulan atau Rp 3.600.000 per tahun (Mufida, dkk, 2020).

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan program untuk memitigasi dampak Covid-19 terhadap masyarakat. Jumlah program perlindungan sosial yang dikeluarkan pada 31 Maret 2020 antara lain (Setkab, 2020):

1. Penambahan alokasi dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Penambahan penerima kartu sembako.
3. Penambahan jumlah pra-penerima kartu tenaga kerja.
4. Pemberian program diskon tagihan listrik bagi pengguna 450 VA dan 900 VA.
5. Menambah alokasi cadangan untuk pengadaan kebutuhan pokok, operasional pasar, dan logistik sebesar Rp 25 triliun,
6. Pemberian bantuan pembayaran kredit bagi pekerja informal.

Instruksi Presiden Nomor 4/2020 mengatur tambahan anggaran untuk program perlindungan sosial dan penanggulangan dampak pandemi terhadap perekonomian nasional. Alokasi anggaran penanganan dampak Covid-19 sebesar Rp. 695,2 triliun. Jumlah tersebut

terdiri dari anggaran bidang kesehatan sebesar Rp. 97,9 triliun dan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp. 597,3 triliun. Anggaran PEN digunakan untuk mendorong sisi penawaran sebesar Rp. 297,6 triliun dan untuk mendukung sisi permintaan sebesar Rp. 299,7 triliun (Abidin, 2021).

Dampak yang ditimbulkan dari aspek ekonomi terhadap penurunan pendapatan masyarakat, maka salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berupa pemberian perlindungan sosial berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi Covid-19, BLT diberikan kepada kelompok masyarakat yang membatasi pandemi Covid-19, meliputi masyarakat miskin, pekerja informal serta pelaku usaha transportasi pemberani. Meski niat pemerintah tersebut mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat dengan pemberian bantuan ini, namun pada tataran pelaksanaannya pemerintah gagal melaksanakannya dengan baik, mengingat salah satu bantuan presiden tersebut terkait dengan masalah korupsi dana bansos. Sedih melihat fakta di lapangan mengingat niat baik tapi dieksekusi oleh orang yang salah.

Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan saat pandemi Covid-19

melanda Indonesia dinilai cukup efektif, namun kebijakan tersebut tidak dapat dirasakan langsung oleh semua dampak positifnya, hal ini akan tergantung pada ketersediaan. Pemerintah merumuskan semua kebijakan yang bertujuan untuk membuat rakyat merasakan kesejahteraan, kemakmuran, kesehatan dan keadilan. Sebagai warga negara, kita dapat membantu pemerintah dengan mengikuti semua kebijakan yang ada untuk memenuhi negara kesejahteraan (Dirkareshza et al, 2021).

Ada dua kebijakan yang biasanya diambil oleh pemerintah dalam menangani masalah ekonomi, yaitu Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter. Kebijakan fiskal adalah langkah pemerintah untuk melakukan perubahan dalam sistem perpajakan atau anggarannya dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang ada, sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh bank sentral (Bank Indonesia), agar uang bisa diselamatkan.

Kebijakan yang diambil untuk mendorong kegiatan ekonomi dalam perekonomian domestik tahun ini terutama ditopang oleh pengeluaran pemerintah atau *government spending*. Dalam menghadapi pandemi Covid,



pemerintah harus bekerja keras menginisiasi berbagai paket kebijakan, baik dari sisi kebijakan pencegahan penyebaran pandemi Covid, maupun kebijakan dalam hal peningkatan kegiatan ekonomi. Stimulus kebijakan fiskal juga menjadi hal terpenting dalam mengurangi dampak negatif akibat pandemi terhadap kegiatan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha dan masyarakat yang paling terdampak.

Stimulus pertama adalah percepatan belanja pemerintah. Mempercepat penggunaan Belanja Modal negara, menandai pengangkatan pejabat perbendaharaan, mempercepat pelaksanaan tender, dll, membuka belanja bansos, transfer ke dana daerah dan desa

2. Perluasan Kartu Sembako meningkat (Rp 150 ribu/ bulan → Rp 200 ribu / bulan). Sudah dilakukan Kementerian Sosial pada Maret 2020.

3. Perluasan target subsidi bunga perumahan dengan penambahan volume rumah sekitar 175 ribu unit rumah. Saat ini dalam proses persiapan pelaksanaan revisi DIPA, masih dalam proses berdasarkan usulan dari Kementerian PUPR. Kontrak dengan Executing Bank direncanakan April 2020

Stimulus Kedua, yaitu

1. Relaksasi Pajak Penghasilan. PPh Pasal 21

Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh Impor PPh Pasal 22, PPh Pasal 25, PPN dipercepat

2. Penyederhanaan dan Percepatan Proses Ekspor-Impor. Penyederhanaan dan pengurangan ekspor dan impor (manufaktur, pangan dan penunjang medis), percepatan proses ekspor-impor bagi pedagang-pedagang terkemuka, dan pelayanan ekspor-impor melalui Ekosistem Logistik Nasional (Fahrika dan Roy, 2020).

Hubungan Kebijakan Fiskal dengan Perekonomian dan Kebijakan Moneter Selama masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktivitas ekonomi melemah, kebijakan fiskal berfungsi sebagai sumber penerimaan bagi pemerintah untuk melanjutkan pembangunan. Dengan demikian, pajak memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Berdasarkan hal tersebut, pajak memiliki beberapa fungsi bagi perekonomian negara.

Pertama, fungsi anggaran, yaitu membiayai segala kebutuhan atau kontestasi negara. Seperti biaya kompensasi pegawai, belanja barang negara, pemeliharaan fasilitas negara, dan lain-lain. Terkait dengan pembangunan, biaya yang dikeluarkan dari tabungan pemerintah. Uang

tabungan diperoleh dari rumus pendapatan domestik dikurangi pengeluaran rutin. Oleh karena itu, penghematan pemerintah harus ditingkatkan seiring dengan biaya pembangunan yang terus meningkat. Peningkatan tersebut diperkirakan berasal dari sektor pajak. Kedua, fungsi regulasi, yaitu pajak dapat digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Misalnya, jika ingin lebih banyak investor berinvestasi, pemerintah harus mengambil keringanan pajak. Di sisi lain, jika pemerintah ingin mempertahankan keberadaan produk dalam negeri, pemerintah harus memberikan bea masuk yang tinggi untuk barang-barang impor.

Ketiga, fungsinya, pajak menyebabkan pemerintah mengatasi perekonomian agar tidak terjadi inflasi. Yaitu dengan mengatur peredaran uang sebagai bentuk kebijakan moneter, memungut pajak, dan menggunakan pajak seefektif mungkin. Terakhir, fungsi redistribusi pendapatan yaitu pajak akan digunakan untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan yang akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja. Dengan demikian, pendapatan masyarakat juga akan meningkat. (Mirani, 2021)

Situasi yang dialami masyarakat akibat pandemi Covid-19 telah memberikan dampak ekonomi. Dampak ekonomi dapat dialami oleh para pekerja. Dampak ekonomi dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan mengurangi tenaga kerja. Salah satu upaya pemulihan ekonomi pasca bencana yang dapat dilakukan melalui peningkatan perekonomian tenaga kerja. Upaya ini dicapai melalui pemerintah untuk memperkuat sumber daya manusia di bidang ekonomi

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bertujuan untuk melindungi, menjaga, dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya di masa pandemi Covid-19. Selain itu, program PEN membantu meningkatkan daya beli masyarakat dan laporan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Program PEN menasar rumah tangga dan sektor usaha paling rentan (UMKM, Korporasi, dan BUMN). Dengan adanya program PEN diharapkan roda perekonomian dapat berputar dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

#### **KESIMPULAN**

Tujuan pokok dari kebijakan pemerintah ialah peningkatan kehidupan dan kesejahteraan rakyat terukur secara ekonomian, masyarakat sejahtera jika

pendapatan riil rata-rata per kapita tinggi dengan distribusi pendapatan yang merata. Tujuan ini tidak dapat berhasil cuma dengan kebijaksanaan ekonomi saja. Dibutuhkan pula kebijaksanaan non kebijaksanaan ekonomi, semacam kebijaksanaan sosial yang menyangkut permasalahan pembelajaran serta kesehatan. Kebijakan ekonomi dan kebijakan non ekonomi harus saling mendukung antara satu dan yang lainnya.

1979-8652 (Print) ISSN 2541-5913 (Online) DOI: <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.5020>

### REFENSI

- Fahrika, A. Ika dan Roy, Juliansyah. (2020) Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh, INOVASI-16 (2), 2020; 206-213 <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>
- Abidin, M. Zainul. (2021). Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19 : Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, Indonesian Treasury Review Vol.6, No.2, (2021), Hal.117-138.
- Goeritman, Happy Indah Nurlita. (2021). Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 melalui Media Sosial, Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi) Vol. 23 No. 1, Juni 2021: 1 - 19
- Ansori, Yoyo Zakaria. (2019). Islam Dan Pendidikan Multikultural, Jurnal Cakrawala Pendas Vol 5 No 2 Edisi Juli 2019.
- Izzaty. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Panic Buying Akibat Covid 19, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Pusat Penelitian Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik Badan Keahlian DPR RI, Vol. XII, No.5/I/Puslit/Maret/2020
- Dirkareshza, Rianda, Dinda Maurizka Azura & Pradana, Roni. (2021). Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19: Antara Negara Sejahtera dan Negara Sehat, Jurnal Mercatoria, 14 (1) Juni 2021 ISSN
- Mirani, Kurnia Putri. (2021). The Government's Fiscal Policy Strategy To Improve The Economy Of

Ristyawati, Aprista. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945, *Administrative Law & Governance Journal*.

Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN. 2621-2781 Online

Saleha Mufida, F.G. Cempaka Timur, Surryanto Djoko Waluyo. (2020). 3 Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi, *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global Website*: <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/independen> E-ISSN: 2721-9755.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta).

Wicaksono, Teguh Yudo dan Mangunsong, Carlos. (2020). Menghitung Implikasi Anggaran Subsidi Pemerintah untuk COVID-19 dan Kerja dari Rumah dalam Mitigasi COVID-19, CSIS